

DAMPAK REKLAMASI PEMBANGUNAN TANGGUL LAUT TERHADAP PEREMPUAN BURUH PEMIPIL KERANG

THE IMPACT OF SEA WALL CONSTRUCTION RECLAMATION ON FEMALE CLAM SHELLERS

Kristina Magdalena Pakpahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia,
Kampus Baru Depok Universitas Indonesia, Jawa Barat 16424, Indonesia
Email koresponden: kristina.magdalena@ui.ac.id

Diterima: 21 Desember 2022; Direvisi: 8 Februari 2023; Disetujui: 9 Februari 2023

Copyright © 2023 The Author



This is an open access article
under the [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) License

How to cite (APA): Pakpahan, K. M. (2023). Dampak Reklamasi Pembangunan Tanggul Laut terhadap Perempuan Buruh Pemipil Kerang. *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya*, 12(1), 24–38. <https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v12i1.1880>

ABSTRACT

Since 1995, reclamation has been used by the government to provide new land areas for settlements, ports, urban areas, tourism areas, etc. Proponents of reclamation have mentioned several positive benefits of reclamation: creating new land, developing tourism, improving the economy of communities around the coast, increasing employment, increasing productive land, and helping improve aquatic habitats. However, reclamation also has negative impacts: eliminating fishermen's livelihoods, causing water pollution, destroying ecosystems, and eliminating access to fishing grounds. Out of many negative impacts of reclamation, what has not been widely discussed is the negative impact on women, especially women who work in post-production sector. This article aims to fill this research gap. This article raises the results of a study on the negative impact of sea wall reclamation on female clam shellers in coastal area of Kalibaru, Cilincing, North Jakarta. Based on data collected using the Feminist Participatory Action Research (FPAR) approach with the FGD and in-depth interview methods, various impacts of the sea wall construction were found felt by women shellfish workers: economic impacts, psychological impacts, ecological impacts, socio-cultural impacts, etc. This article focuses on discussing the impact of sea wall construction reclamation on female clam shellers by highlighting the conditions before and after the construction of the sea wall, and the differences in the impacts and effects of sea wall construction based on gender using a feminist political ecology approach.

Keyword: *reclamation, sea walls, women, laborers, coastal area*

ABSTRAK

Sejak 1995, reklamasi telah digunakan pemerintah untuk menyediakan kawasan daratan baru untuk pemukiman, pelabuhan, kawasan perkotaan, kawasan pariwisata dan sebagainya. Para pendukung reklamasi telah menyebutkan beberapa manfaat positif reklamasi: terciptanya lahan

baru, pengembangan pariwisata, meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar pantai, menambah lapangan kerja, menambah lahan produktif, dan membantu memperbaiki habitat perairan. Namun demikian, reklamasi juga menimbulkan dampak negatif sebagai berikut: menghilangkan mata pencaharian nelayan, menimbulkan pencemaran air, merusak ekosistem, menghilangkan akses ke daerah penangkapan ikan, dan sebagainya. Dari sekian banyak dampak negatif di atas, yang belum banyak diulas di dalam publikasi-publikasi kajian mengenai reklamasi adalah dampak negatifnya terhadap perempuan khususnya perempuan yang bekerja pasca produksi. Artikel ini ingin mengisi kesenjangan penelitian tersebut. Artikel ini mengangkat hasil kajian tentang dampak negatif reklamasi pembangunan tanggul laut terhadap perempuan buruh pemipil kerang di kawasan pesisir Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Berdasarkan data yang dikumpulkan dengan pendekatan Feminist Participatory Action Research (FPAR) dengan metode FGD dan wawancara mendalam, ditemukan hasil bahwa beragam dampak dari pembangunan tanggul laut yang dirasakan oleh perempuan buruh pemipil kerang termasuk dampak ekonomi, dampak psikologi, dampak ekologi, dampak sosial-budaya dan sebagainya. Dalam artikel ini, saya akan fokus membahas dampak reklamasi pembangunan tanggul laut terhadap perempuan buruh pemipil kerang dengan menyoroti kondisi tersebut sebelum dan sesudah pembangunan tanggul laut, dan perbedaan dampak dan efek pembangunan tanggul laut berbasis gender dengan menggunakan pendekatan ekologi politik feminis.

Kata kunci: reklamasi, tanggul laut, perempuan, buruh, wilayah pesisir

PENDAHULUAN

Laut merupakan salah satu ekosistem utama di dunia, dan memainkan peran penting dalam pengaturan iklim dan produksi ikan. Laut juga menyediakan tempat berlindung bagi berbagai spesies yang sangat penting untuk sistem kehidupan di bumi. Pesisir merupakan kawasan dan ekosistem yang kaya dan potensial untuk dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan. Potensi besar tersebut menjadi sangat penting sebagai modal awal pembangunan. Pembangunan diarahkan pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Namun, sering kali pembangunan di pesisir menyebabkan rusaknya ekosistem dan menyebabkan hilangnya sumber daya (Sayuti 2020). Salah satu penyebabnya adalah karena pembangunan dilakukan dengan cara reklamasi lahan basah menjadi daratan.

Di Indonesia, reklamasi diakui sebagai salah satu contoh pengelolaan kawasan pesisir. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil me-

nyebutkan reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. Reklamasi harus direncanakan pada areal yang telah memiliki zonasi wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Sedangkan dalam konteks landasan hukum reklamasi, kegiatan reklamasi di wilayah pesisir harus diatur di tingkat provinsi dalam bentuk Peraturan Daerah Zonasi Pesisir dan Perizinan. Kegiatan reklamasi harus mendapat izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa reklamasi berdampak positif dan negatif terhadap berbagai aspek kehidupan, terutama orang-orang yang tinggal di pesisir dan mencari nafkah di laut. Beberapa dampak positif yaitu terciptanya lahan baru bagi suatu kota atau negara untuk perluasan kota, perencanaan pesisir, pengembangan pariwisata, dan

lain-lain. Ssegi ekonomi, reklamasi akan membantu meningkatkan kualitas dan nilai ekonomi masyarakat sekitar pantai, menambah lapangan kerja, dan menambah lahan produktif. Sedangkan dari segi lingkungan, reklamasi dapat mencegah erosi berkelanjutan dan membantu memperbaiki habitat perairan (Yustiana, Fadli, and ... 2021). Di Barru, Sulawesi Selatan, reklamasi diakui berdampak positif bagi masyarakat pesisir karena dapat menciptakan peluang peningkatan ekonomi masyarakat pesisir di sekitar kawasan lahan reklamasi (Sayuti 2020).

Reklamasi juga berdampak negatif terutama terhadap alam dan perubahan struktur sosial, ekonomi dan budaya masyarakat pesisir. Reklamasi menyebabkan nelayan baik perempuan maupun laki-laki kehilangan mata pencaharian, air tercemar, merusak ekosistem, dan menghilangkan akses ke daerah penangkapan ikan (Adharani et al. 2019; Fabinyi et al. 2022; Ii 2017; Qiao, Yin, and Luo 2020; Royandi 2019; Suhardi 2021; Suo, Lin, and Sun 2017; Suriadi 2019). Selain itu, reklamasi menyebabkan hasil tangkapan nelayan mengalami penurunan sehingga mengubah kondisi sosial dan ekonomi nelayan, dan hal ini dapat memicu ketidakharmonisan yang sangat rawan seperti menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga (Khaerah, Hartaman, and Rahman 2021).

Di Manila, Filipina, selain menghilangkan pekerjaan dan peluang ekonomi masyarakat, reklamasi yang dilakukan untuk menyediakan pemukiman di perkotaan justru mengakibatkan potensi pengusuran pada masyarakat yang lahannya direklamasi (Valenzuela, Esteban, and Onuki 2020). Temuan lainnya terjadi di Pulau Serangan yang mana reklamasi telah mengubah kehidupan nelayan, misalnya daerah pencarian ikan yang semakin sempit. Selain itu, tempat parkir perahu menjadi terbatas, banyak anak muda yang tidak lagi bekerja sebagai nelayan, para orang tua beralih profesi, menjadi tukang parkir

dan satpam, serta berjualan rumput laut dan kerang. Beralih profesi tidak menjamin hidup mereka. Situasi ini juga mengubah cara pandang mereka terhadap laut (Egua-voen 2022).

Secara praktis, kajian mengenai dampak reklamasi sudah banyak diperdebatkan di kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Abdul Halim, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menyebutkan bahwa reklamasi mengakibatkan kerugian yang sangat signifikan karena telah menghilangkan akses melintasi laut (melaut) untuk melakukan kegiatan mencari nafkah. Hal ini juga menyebabkan terjadinya peningkatan ongkos produksi yang berdampak negatif pada resiko peningkatan utang nelayan¹. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) juga memberikan komentar yang mana proyek reklamasi di Teluk Jakarta justru menguntungkan bisnis properti dan menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, banjir, dan merugikan nelayan karena kehilangan wilayah tangkapan². Ketua Solidaritas Perempuan, Puspa Dewy mengatakan reklamasi teluk memiliki dampak yang sangat buruk, tidak hanya terhadap lingkungan tetapi termasuk pada penghancuran sistem sosial kehidupan masyarakat termasuk perempuan³.

Belakangan ini, Teluk Jakarta sering mengalami banjir. Peristiwa banjir tersebut bukan hanya karena tingginya debit air dari hulu dan hujan lokal yang tidak terakomodasi oleh sistem drainase yang ada, melainkan juga karena banjir rob dan penurunan muka tanah (Suriadi 2019). Kondisi tersebut mendorong berbagai

¹<https://www.mongabay.co.id/2016/04/26/akibat-reklamasi-teluk-jakarta-nelayan-dan-perempuan-nelayan-terkena-getahnya/>

²<https://megapolitan.kompas.com/read/2016/04/02/16035481/Tiga.Alasan.KNTI.Keberatan.dengan.Proyek.Reklamasi>

³ <https://www.solidaritasperempuan.org/solidaritas-perempuan-reklamasi-teluk-jakarta-hancurkan-sistem-sosial/>

pihak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan banjir rob, salah satunya upaya mitigasi dengan melaksanakan pembangunan tanggul laut. Upaya ini sudah dilakukan di tempat lain seperti di Surabaya (Putra et al. 2014). Akan tetapi, pembangunan tanggul laut yang bertujuan untuk mencegah banjir rob pada kenyatannya telah berdampak negatif pada kehidupan masyarakat, terutama orang-orang yang tinggal di lokasi pembangunan dan selama ini mencari nafkah di laut.

Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara adalah salah satu lokasi pembangunan tanggul laut. Pembangunan tanggul laut yang lokasinya berada di sekitar permukiman dan aktivitas masyarakat telah menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari aspek sosial, budaya, ekonomi, maupun ekologi. Masyarakat sekitar biasanya menjelaskan dampak-dampak ini berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman mereka. Secara sosial-budaya, misalnya upacara pesta laut tidak lagi dilakukan setiap tahun seperti sebelum-sebelumnya. Secara ekonomi, mereka mendeskripsikan dengan berkurangnya hasil tangkapan yang mempengaruhi pendapatan harian mereka. Secara ekologi, mereka menjelaskan melalui tanda-tanda perubahan warna air (dari jernih menjadi kotor) atau perubahan iklim.

Dampak pembangunan tersebut dirasakan oleh perempuan dan laki-laki, namun tidak banyak yang melihat dan mendeskripsikan pengalaman-pengalaman tersebut dari perspektif perempuan. Padahal, peran dan kontribusi perempuan dalam perikanan sangatlah besar dan ini sudah lama menjadi perhatian para peneliti di seluruh dunia. Meskipun kebanyakan perempuan berperan dalam perikanan skala kecil atau bekerja pasca panen, hal ini tidak dapat diabaikan sehingga seharusnya mereka dipertimbangkan dalam program pembangunan di pesisir. Program pembangunan maupun pembentukan kebijakan mengabaikan kegiatan perempuan, dan

mengabaikan pentingnya kontribusi mereka dalam mempertahankan ekonomi negara dan keluarga. Salah satu temuan yang membuktikan partisipasi perempuan adalah data yang menyatakan bahwa dalam kegiatan penangkapan ikan skala kecil, sekitar 2,9 juta (\pm 835.000) ton setiap tahunnya merupakan kontribusi perempuan (Harper et al. 2020).

Kontribusi dan peran ini tentu saja berbeda di setiap negara atau komunitas, akan tetapi perempuan adalah pemain penting dalam produksi, pengolahan, dan pemasaran. Selain peran itu, perempuan melakukan tugas rumah tangga, seperti pekerjaan rumah sehari-hari, merawat anak dan menyiapkan kebutuhan makanan keluarga. Contohnya, di Kabupaten Sumpenep Madura, perempuan atau istri pembudidaya rumput laut sangat berkontribusi dalam pendapatan (*income*) keluarga, dan dalam rumah tangga mereka berperan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik seperti memasak, mengurus rumah, mengantar dan menjemput anak dari sekolah, mengasuh anak, dan mengatur keuangan keluarga (Sahidu, Made, and Riniwati 2021).

Peran perempuan dalam perikanan sudah terbukti, partisipasi mereka dianggap kurang penting sehingga menyebabkan hampir tidak terlihatnya perempuan sebagai kontributor di sektor ini. Misalnya, di Brazil, Acau, perempuan bekerja untuk mengumpulkan kerang, dan merupakan sumber pendapatan utama keluarga. Namun karena kurangnya pengakuan, mereka sering kali diabaikan dari bantuan-bantuan seperti alat untuk mengangkut kerang, asuransi kesehatan, dan dukungan pada masa harga rendah (da Silva Mourão et al. 2020).

Kebijakan proyek pembangunan yang kurang memperhatikan keberadaan perempuan seperti ini menyebabkan kebutuhan dan kepentingan perempuan kurang terakomodir pada saat merancang kebijakan pembangunan. Padahal, ketika

proyek pembangunan menyebabkan transisi aktivitas penghidupan, maka perempuan juga akan mengalami transisi itu. Ketika terjadi penurunan tangkapan ikan yang parah di wilayah pesisir, rumah tangga mengalami transisi mata pencaharian. Perempuan dan laki-laki mengalami pengalaman yang berbeda. Kasus ini bisa dilihat di Danau Qarun, Mesir yang mengalami penurunan tajam penangkapan ikan dalam beberapa tahun terakhir karena parasit *isopoda*. Perubahan ini membentuk ulang kembali peluang mata pencaharian di masyarakat dan peran perempuan dalam keluarga secara signifikan, dan kondisi ini mengubah peran berbasis gender. Laki-laki mencari mata pencaharian dengan bermigrasi ke tempat lain untuk menangkap ikan, beberapa beralih pekerjaan dengan mencari pekerjaan di kota, sedangkan perempuan yang ditinggalkan menghadapi situasi kemiskinan dan berbagai transisi di tingkat rumah tangga, pasar dan masyarakat. Ketika laki-laki tidak membawa hasil, perempuan beralih dari pekerja keluarga menjadi wiraswasta. Transisi ini penuh dengan bahaya bagi perempuan karena budaya patriarki yang menempatkan perempuan sebagai tenaga kerja tidak dibayar. Selain itu, ketika laki-laki pergi meninggalkan rumah tangga, maka perempuan terpaksa menghadapi situasi kemiskinan, tantangan menggabungkan pekerjaan berupah dan tanggung jawab keluarga tanpa adanya pendukung khususnya dalam pembagian kerja rumah tangga (Barsoum 2021).

Reklamasi pembangunan tanggul laut berdampak pada laki-laki dan perempuan, namun pengalaman keduanya berbeda. Konstruksi sosial yang dilekatkan pada mereka sebagai penanggung jawab rumah tangga menuntut mereka untuk memastikan keberlanjutan kehidupan keluarganya. Sehingga pekerjaan-pekerjaan rumah (seperti menyiapkan makanan dan membersihkan rumah), pendidikan anak, hingga kesehatan anggota keluarga men-

jadi bagian dari peran perempuan. Oleh karena itu, pada kondisi di mana sumber penghidupan mulai berkurang, ada perbedaan dampak berbasis gender, yang mana perempuan mengalami beban lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Gender yang dimaksud bukanlah jenis kelamin (sex) biologis laki-laki dan perempuan seperti yang ada pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), melainkan sebagai konstruksi sosial yang diberikan secara budaya kepada laki-laki dan perempuan.

Relasi antara laki-laki dan perempuan sebelum krisis memang sudah memperlihatkan adanya ketidaksetaraan di antara keduanya. Laki-laki dan perempuan sama-sama bekerja dan memiliki pendapatan (*income*). Jadi keduanya berkontribusi dalam pemenuhan seluruh kebutuhan keluarga. Terlepas dari siapa yang mendapatkan pendapatan lebih banyak tidak begitu menonjol dalam rumah tangga mereka. Cara-cara menghasilkan uang yang dilakukan, meskipun berbeda namun tidak pernah menonjol dan diperdebatkan.

Status perempuan sering kali diabaikan dari dunia perikanan dan kenelayanan, tetapi status itu sangat penting dalam hubungan di rumah tangganya. Perempuan karena menghasilkan pendapatan maka dia memiliki posisi dan kekuasaan (*power*) dalam keluarga. Memang kekuasaan yang dimiliki perempuan sering kali diposisikan lebih rendah dari laki-laki, dan oleh karena itu ketidaksetaraan di antara keduanya tetap ada. Ketimpangan lainnya terlihat dari peran suami dan istri dalam rumah tangga. Secara finansial keduanya sama-sama berkontribusi, tetapi beban kerja domestik kebanyakan ditangani oleh perempuan. Jarang sekali laki-laki mengerjakan pekerjaan domestik, beban kerja mereka hanya sebatas pekerjaan di laut, berbeda dengan perempuan yang mengerjakan keduanya.

Kondisi ini berdampak pada bagaimana perempuan dan laki-laki mengalami

krisis secara berbeda. Federici menjelaskan bagaimana konstruksi gender berkontribusi pada perbedaan peran laki-laki dan perempuan dalam sistem kapitalisme (Federici, 2004). Perbedaan ini menyebabkan perempuan dan laki-laki mengalami proses akumulasi primitif yang berbeda. Perempuan mengalami efek yang lebih parah dan hal ini disebabkan oleh dua hal yaitu: Pertama, sebagaimana laki-laki kelas proletariat, perempuan mengalami dampak pengurangan pendapatan, tetapi penurunan ini lebih banyak dibandingkan dengan yang dialami oleh laki-laki. Kedua, banyak perempuan mengalami domestifikasi, kerja di rumah tidak dibayar, tergantung pada penghasilan suami atau laki-laki, anggapan bahwa laki-laki adalah kelompok yang paling pantas menerima upah. Akibat domestifikasi ini, perempuan kehilangan otoritas atas tubuhnya untuk menjadi tenaga kerja yang tidak dibayar atau diupah murah.

Federici menjelaskan lebih jauh bahwa faktor-faktor lain yang menyebabkan pengalaman krisis ini adalah pemagaran (*enclosure*). Pemagaran ini menyebabkan perempuan kehilangan akses terhadap *commons* yang sebelumnya adalah tempat atau ruang perempuan untuk mendapatkan sumber makanan, juga sebagai ruang bagi perempuan untuk membangun solidaritas sesama perempuan. Proses akumulasi primitif, perempuan kehilangan semua tempat, tidak hanya ruang kerja, tetapi juga otonomi atas tubuh, kebebasan, keamanan, pengetahuan dan praktek kehidupan yang sebelumnya mereka miliki. Perempuan masuk dalam ruang domestik yang memosisikannya sebagai makhluk paling rendah dari laki-laki yang mendapatkan upah dan kontribusi kerjanya terhitung di dalam ekonomi kapitalisme. Untuk kepentingan kapitalisme tubuh perempuan menjadi obyek pengaturan dan pendisiplinan yang memberikan efek negatif pada kehidupan perempuan, baik

secara fisik, psikologis dan hukum (Federici 2004).

Kondisi perempuan bahkan lebih baik pada masa feodalisme. Memang hubungan antara laki-laki dan perempuan sudah tidak setara sejak masa feodalisme, namun hubungan ini tidak terlalu signifikan karena dalam relasi ini hubungan stratifikasi tidak terlalu jelas. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan tidak diatur sedemikian rupa karena keduanya bekerja di dalam penghidupan keluarga. Berbeda dengan di masa kapitalisme di mana peran domestik (menjaga keberlangsungan keluarga) dan reproduktif (memproduksi tenaga kerja) perempuan lebih diutamakan namun tidak diperhitungkan atau tidak memiliki nilai, meskipun kedua peran ini sangat penting dalam mendukung proses kapitalisme. Kekuasaan (*power*) yang dimiliki perempuan menjadi semakin lemah karena mereka pada akhirnya hanya menggantungkan hidupnya pada pendapatan laki-laki. Dominasi laki-laki semakin kuat karena para perempuan, dan pada saat di mana laki-laki atau suami mereka tidak menghasilkan uang, maka ini memperkuat ketidaksetaraan di antara keduanya.

Aspek gender sering kali diabaikan dari kebijakan pembangunan, termasuk pada pembangunan tanggul laut di lokasi penelitian ini. Padahal, menurut saya, untuk memahami dampak pembangunan tanggul laut terhadap perempuan secara menyeluruh, penting untuk melihat perspektif gender. Apa yang dialami perempuan dan laki-laki dan yang membedakannya, bagaimana dampak tersebut berbeda dan pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari mereka, dan mengapa dampaknya berbeda pada laki-laki dan perempuan. Pendekatan ekologi politik feminis untuk mendeskripsikan pertanyaan-pertanyaan di atas dengan menggunakan contoh kasus pembangunan tanggul laut di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara.

Ekologi politik feminis adalah sub-bidang dari ekologi politik yang secara eksplisit bertujuan untuk mengatasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, mengarahkan perhatian pada proses gender yang mendasari politik akses sumber daya, dan pada saat yang sama memperjelas agensi gender dari mereka yang berjuang untuk keadilan dalam menghadapi transformasi (Elmhirst 2015).

Ekologi politik feminis berusaha untuk memahami dan menafsirkan pengalaman lokal dalam konteks proses global perubahan lingkungan dan ekonomi. Ekologi politik feminis berfokus pada gender, dan mendiskusikan interaksi gender dengan golongan, ras, umur, suku, dan kebangsaan (Dianne Rocheleau, Barbara Thomas-Slayter 1996)

Terdapat 3 tema kritis dalam pendekatan ekologi politik feminis, yaitu: Pertama, pengetahuan gender untuk “kelangsungan hidup” yang meliputi penciptaan, pemeliharaan, dan perlindungan kesehatan lingkungan di rumah, di tempat kerja, dan di ekosistem regional; Kedua, pengetahuan gender yang mempertimbangkan hak dan tanggung jawab lingkungan sehubungan dengan properti, sumber daya, ruang, dan semua variasi hak hukum dan adat yang berbasis gender; Ketiga, politik lingkungan berbasis gender dan aktivisme akar rumput. Keterlibatan perempuan dalam perjuangan kolektif atas sumber daya alam dan masalah lingkungan berkontribusi pada redefinisi identitas mereka, makna gender, dan masalah-masalah lingkungan alam (Dianne Rocheleau, Barbara Thomas-Slayter 1996).

Semua dampak negatif dari reklamasi, dan kajian-kajian mengenai perempuan di pesisir yang ditunjukkan pada penjelasan di atas, kebanyakan yang dibahas adalah mengenai kontribusi perempuan dalam sektor perikanan, dampak reklamasi terhadap perempuan nelayan, partisipasi dalam pembangunan dan lain sebagainya. Belum banyak yang mengkaji mengenai

dampaknya secara spesifik terhadap perempuan buruh upahan, dalam hal ini perempuan buruh pemipil kerang, yakni mereka yang bekerja sebagai tenaga kerja paska produksi yang diupah harian. Artikel ini difokuskan untuk melihat hal tersebut di salah satu lokasi reklamasi pembangunan tanggul laut yakni di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Perempuan di lokasi ini dikategorisasikan sebagai buruh karena mereka tidak pergi ke laut melakukan penangkapan ikan, mengumpulkan kerang dan sebagainya, tetapi mereka bertanggung jawab untuk membersihkan dan mengupas kerang, mereka bekerja di darat tempat penampungan kerang yang pada umumnya berada di sekitar lokasi rumah tempat tinggal mereka. Laki-laki di sisi lain berperan di laut, sebagian besar mengumpulkan kerang liar, menangkap ikan, dan ada pula yang melakukan budidaya ternak kerang, sebagian lagi berperan sebagai tenaga kerja pengangkut kerang ke lokasi penampungan. Pekerjaan yang dilakukan perempuan sering kali berupah rendah, dan dinilai tidak sebanding dengan penghasilan laki-laki.

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bersama Solidaritas Perempuan⁴ untuk melihat dampak reklamasi terhadap perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan FPAR (Feminist Participatory Action Research), sebuah metode

⁴ Solidaritas Perempuan (SP) – Women’s Solidarity for Human Rights, merupakan organisasi feminis yang didirikan pada 10 Desember 1990. SP fokus bekerja dengan perempuan akar rumput dengan visi untuk mewujudkan tatanan sosial yang demokratis, berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, kesadaran ekologis, menghargai pluralisme dan anti kekerasan yang didasarkan pada sistem hubungan laki-laki dan perempuan yang setara di mana keduanya dapat berbagi akses dan kontrol atas sumber daya alam, sosial, budaya, ekonomi dan politik secara adil.

penelitian yang dikembangkan dari Participatory Action Research (PAR). FPAR mengintegrasikan perspektif dan proses feminis karena keduanya pada dasarnya tertarik untuk menantang hubungan kekuasaan yang tidak adil dan mengakar.. Penelitian ini berbasis pada empat teknik pengumpulan data yaitu; 1) studi literatur terhadap artikel yang relevan; 2) observasi partisipasi; 3) wawancara mendalam; dan 4) FGD yang menyorot perempuan pengupas kerang yang tinggal di lokasi pembangunan tanggul laut. Penelitian ini dilakukan pada April – Juni 2019 di Kecamatan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks Lokasi Penelitian dan Pembangunan Tanggul Laut

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Masyarakat di lokasi tersebut salah satu kelompok yang terdampak oleh reklamasi pembangunan tanggul laut. Pembangunan tanggul laut merupakan bagian dari *masterplan* Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN) yang bertujuan untuk mengurangi risiko banjir rob, dan mencegah penurunan permukaan air⁵. Pada satu sisi, tanggul laut melindungi pemukiman masyarakat dari abrasi maupun banjir, namun di sisi lain, tanggul laut telah mempengaruhi aktivitas kehidupan mereka untuk mencari nafkah di laut.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jakarta, pada 2019, jumlah masyarakat di Kelurahan Kalibaru, laki-laki dan perempuan adalah sebanyak 7u 2014 jiwa. Masyarakat di Kelurahan Kalibaru merupakan nelayan tradisional skala kecil, dan mayoritas aktivitasnya adalah sebagai petani pembudidaya kerang. Masyarakat yang bermukim di lokasi tersebut pada umumnya adalah pendatang dari Indramayu, Jawa Barat dan dari Brebes,

Jawa Tengah. Sebagian besar dari mereka sudah tinggal menetap bersama anggota keluarga dan memiliki rumah, namun masih ada beberapa yang tinggal tidak menetap, tidak memiliki rumah dan keluarganya (anak dan istri) berada di kampung halaman. Perahu yang digunakan merupakan perahu kecil di bawah 10 GT.

Subjek Penelitian

Tulisan ini secara spesifik melihat dampak reklamasi pembangunan tanggul laut terhadap perempuan buruh pemipil kerang di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Subjek penelitian adalah para perempuan yang bekerja sebagai pemipil kerang (membersihkan dan mengupas). Pekerjaan membersihkan dan mengupas kerang merupakan salah satu aktivitas yang menghasilkan uang tunai dan dinilai cocok dengan status mereka sebagai ibu rumah tangga.

Para perempuan buruh pemipil kerang ini biasanya bekerja setelah kerang tiba di tempat pengolahan, yang mana cenderung dekat dengan dengan rumah mereka, dan beberapa melakukan pekerjaan ini di teras atau halaman rumah mereka. Pekerjaan membersihkan dan mengupas kerang sudah dilakukan oleh perempuan sejak mereka kecil. Pemisahan kerja-kerja di laut dan di darat sudah terjadi sejak dulu, laki-laki bekerja di laut dan perempuan bekerja di darat. Situasi ini disebabkan oleh akses dan kontrol perempuan terhadap sumber daya yang berbeda khususnya dalam hal pengetahuan dan peralatan melaut. Akses terhadap peralatan yang berhubungan dengan kelautan, serta keterampilan melaut seperti menggunakan kapal termasuk mengemudikannya hanya mampu dilakukan oleh laki-laki, sedangkan perempuan hanya mampu menggunakan peralatan sederhana.

Pemisahan aktivitas laki-laki dan perempuan di sektor perikanan ini mengakibatkan ketergantungan perempuan pada hasil tangkapan laki-laki sebagai sumber mata pencaharian. Pemisahan ini meng-

⁵<https://www.republika.co.id/berita/r2236g314/pembangunan-tanggul-laut-cilincing-jakarta>

akibatkan ketergantungan perempuan terhadap pekerjaan laki-laki. Karena mata pencaharian perempuan bergantung pada hasil tangkapan laki-laki, pada masa di mana laki-laki tidak bisa melaut, para perempuan harus mencari alternatif lain dengan membuat dan menjual kue, dan pada masa ini, mereka dituntut untuk mampu menyeimbangkan peran produktif dan reproduktif mereka (Susilowati n.d.).

Dampak Pembangunan Tanggul Laut terhadap Perempuan Buruh Pemipil Kerang

Dampak Pembangunan Tanggul Laut Secara Umum

Secara umum, dampak utama pembangunan tanggul laut adalah akses ke laut yang semakin sulit. Pembangunan tanggul laut yang lokasinya berada di sekitar permukiman masyarakat pesisir dan tempat-tempat masyarakat mencari nafkah, perlahan membatasi akses masyarakat terhadap ruang-ruang jelajah mereka di laut. Jarak melaut semakin jauh menyebabkan biaya produksi semakin tinggi termasuk biaya bahan bakar dan konsumsi. Secara konseptual, (Ribot and Peluso 2003) mendefinisikan akses sebagai kemampuan (*ability*) untuk memperoleh manfaat dari sesuatu, dan kekuasaan yang dimiliki seseorang berkaitan erat dengan akses. Orang yang memiliki kekuasaan akan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan manfaat dari suatu sumber daya. Defenisi akses tersebut dirumuskan untuk melengkapi teori properti yang selama ini merujuk pada hal-hal yang menyangkut hak atas sesuatu. Teori akses tidak sekadar berfokus pada penguasaan sumber daya alam tertentu hanya karena memiliki hak, tetapi juga melihat kemampuan seseorang untuk menguasai sumber daya alam tertentu tanpa adanya keterikatan langsung secara legal.

Laut adalah kawasan yang bisa dimiliki oleh siapapun, namun kepemilikan di sini bukan tentang kepemilikan legal

melainkan dapat dimanfaatkan oleh siapa pun. Meskipun demikian, belakangan muncul peraturan yang mengatakan bahwa pengelolaan laut dikategorikan sebagai kewenangan negara. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan pasal 6 ayat (2) yang mengatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak melakukan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam dan lingkungan di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Meskipun tidak ada kepemilikan legal atas laut, masyarakat khususnya para nelayan memiliki akses dalam hal memanfaatkan sumber daya laut, seperti menangkap ikan, membudidayakan ternak ikan, berburu kerang dan sebagainya. Hal ini berlaku pada masyarakat pesisir di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara.

Jarak melaut yang semakin jauh menyebabkan hasil tangkapan yang semakin tidak menentu, dan biasanya mereka tidak akan kembali sebelum mendapatkan hasil. Alasannya karena mereka telah mengeluarkan ongkos melaut (bensin dan konsumsi) yang cukup besar. Sehingga jika pulang tanpa membawa hasil, mereka akan rugi. Hal ini jugalah yang menyebabkan waktu melaut sulit diprediksi. Persoalan akses juga muncul karena adanya eksklusi. Eksklusi adalah kemampuan untuk mencegah atau membatasi pihak lain untuk mendapatkan manfaat dari sesuatu. Sama seperti akses, eksklusi bukanlah proses acak, melainkan sesuatu yang dipaksakan oleh yang kuat kepada yang lemah secara terstruktur dan terhubung dengan kekuasaan (Hall, Hirsch, and Li 2011). Proses eksklusi terbentuk dari empat kekuasaan yaitu peraturan (*regulation*); kekuatan (*force*), dan legitimasi (*legitimation*), dan pasar (*market*).

Persoalan akses inilah dampak paling besar yang dialami oleh laki-laki. Pembangunan tanggul laut membatasi akses terhadap lokasi mencari kerang, dan

secara perlahan mempersempit tempat-tempat kerang untuk berkembang biak. Akses terhadap laut semakin sulit, untuk melaut laki-laki harus berlayar lebih jauh, hasil tangkapan pun terkadang tidak sebanding dengan ongkos yang dikeluarkan untuk melaut. Dulu misalnya biaya yang dibutuhkan sekitar 100.000 rupiah, sekarang bisa mencapai 200.000 rupiah. Jarak melaut ini juga mempengaruhi perahu yang digunakan, karena semakin jauh maka perahu yang mereka miliki tidak lagi cukup memadai untuk melaut, akibatnya muncul kebutuhan untuk mengganti perahu.

Berkurangnya hasil laut memaksa mereka untuk mencari alternatif mata pencaharian. Sebagian laki-laki mencari pekerjaan sampingan dengan ikut bekerja di kapal-kapal besar, seperti kapal udang dan kapal cumi. Ada pula yang melakukan pinjaman bank untuk usaha budidaya kerang hijau karena itu dianggap lebih menguntungkan daripada berburu kerang hijau di laut. Bagi mereka tidak mudah untuk beralih profesi, tidak banyak keahlian yang dimiliki selain mencari kerang dan menangkap ikan di laut. Sulit untuk bekerja menjadi tukang, supir, berdagang, dan sebagainya. Dengan demikian, berburu kerang masih menjadi pilihan utama yang masih bertahan hingga kini. Selain itu, waktu yang dihabiskan selama melaut semakin tidak menentu. Kalau dulu mereka berangkat jam 05.00 WIB dan kembali antara jam 10.00-11.00 WIB, sekarang bisa mencapai jam 13.00 WIB hingga tiba di lokasi penampungan.

Dampak Pembangunan pada Perempuan Pemipil Kerang

Pembangunan berdampak buruk pada kesejahteraan, posisi dan status ekonomi perempuan, beban kerja perempuan meningkat, hilangnya kendali atas sumber daya, hilangnya pekerjaan atau kegiatan subsisten perempuan. Bias pembangunan yang menganggap bahwa laki-laki adalah pekerja paling produktif, sedangkan pe-

empuan sebagai reproduksi: mengurus rumah, keluarga, ekonomi rumah tangga berpengaruh terhadap program-program pembangunan yang ada.

Para feminis menganalisis pentingnya isu gender dalam pembangunan, karena selain menjadi korban patriarki, perempuan juga menjadi korban dalam skema pembangunan kapitalis, di mana kondisi ini mereproduksi kekuasaan asimetris. Dalam wacana pembangunan, perempuan juga menjadi korban secara ekonomi, karena pembangunan memaksa perempuan untuk maju secara ekonomi. Padahal kemajuan bagi perempuan tidak hanya sekadar berdaya secara ekonomi, tetapi juga harus memiliki posisi tawar dengan keluarga, dan menjadu subjek baru. Mereka tidak lagi hanya objek pembangunan, tetapi harus memiliki posisi dalam pengambilan-pengambilan keputusan (Klenk 2004).

Dampak pembangunan bagi perempuan meningkatkan pemikiran-pemikiran tentang perempuan dalam pembangunan (WID), sebuah konsep yang dikembangkan sekitar 1970an sebagai respon atas kritik para feminis yang mengatakan proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan masih banyak meninggalkan perempuan, perempuan dianggap tidak ada. Oleh karena itu, dengan mengembangkan WID, perempuan mulai diberikan program khusus, ada proyek pembangunan dan kegiatan-kegiatan tersendiri yang dianggap sebagai proses pelibatan perempuan. Tetapi hal ini kemudian dikritik karena dianggap masih melibatkan perempuan secara terpisah dari upaya pembangunan secara besar dan kegiatan untuk perempuan seringkali hanya sekadar tempelan saja. Sebagai kritik terhadap WID maka muncul perempuan dan pembangunan (WAD), di mana keadaan perempuan lebih diperhatikan sehingga kesannya bukan hanya tempelan tetapi benar-benar dimasukkan ke dalam proses-proses pembangunan, termasuk memperhatikan kebutuhan perem-

puan dan hal-hal apa yang bisa dilakukan untuk perempuan. Perempuan yang selama ini, dijadikan objek dalam pembangunan, dan dalam keluarga tidak memiliki posisi untuk memutuskan sesuatu, dengan WAD, maka perempuan diharapkan tidak hanya maju secara ekonomi tetapi juga membangun subjektivitas baru. Mendorong gender dalam pembangunan juga memperhatikan relasi-relasi sosial yang ada, relasinya dengan anggota keluarga, masyarakat, relasi sosial dengan institusi penyelenggara proyek, negara, sehingga majukan tidak hanya dilihat dari satu sisi saja seperti ekonomi, melainkan dari banyak aspek (M. Patricia Connelly, Tania Murray Li, Martha MacDonald 2000).

Penelitian di lokasi ini, perempuan tidak pergi melaut seperti laki-laki pada umumnya. Mereka bekerja sebagai perempuan buruh pemipil kerang (mengupas dan membersihkan) di mana pekerjaan ini dilakukan setelah laki-laki kembali dari laut dan kerang telah tiba di penampungan. Bagi perempuan, pekerjaan pemipil kerang ini sangat menguntungkan karena di tengah-tengah peran mereka untuk mengurus kerja-kerja domestik (menyiapkan makanan, mencuci, memasak, merawat anak, dan lain-lain), mereka dapat bekerja dan menghasilkan uang. Mereka tidak perlu mengkhawatirkan ketersediaan makanan di rumah, karena mereka bekerja di sekitar rumah tempat tinggalnya. Menjadi buruh pemipil kerang adalah satu-satunya pilihan yang paling tepat menurut mereka. Ada pilihan lain misalnya dengan membuka usaha kecil-kecilan seperti warung, tetapi pilihan semacam ini hanya bisa dikerjakan oleh mereka yang memiliki modal. Selain itu, warung di tempat ini sudah terlalu banyak, hampir ada di setiap jarak 50-100 meter.

1. Dampak Secara ekonomi

Pekerjaan perempuan sebagai pemipil kerang sudah dilakukan sejak mereka kecil. Dulu sebelum pembangunan tanggul, peluang untuk mendapatkan penghasilan

sebagai pemipil kerang mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga. Sedangkan penghasilan suami dapat ditabung untuk pengeluaran lainnya seperti biaya pendidikan dan kesehatan yang membutuhkan uang tunai. Dulu, meskipun upah murah, namun karena kerang yang dibersihkan dan dikupas memiliki kualitas dan kuantitas yang baik, maka hasilnya cukup untuk membeli beras, lauk pauk, uang jajan anak-anak dan lain sebagainya. Pekerjaan ini bahkan tidak membutuhkan modal (uang) seperti pekerjaan laki-laki, sehingga tidak ada pengeluaran uang tunai untuk kebutuhan bekerja.

Pembangunan tanggul laut, para buruh perempuan pemipil kerang lebih menikmati pekerjaan ini. Hal ini karena kerang yang dihasilkan memiliki ukuran besar sehingga mengupas dan membersihkan kerang pun lebih mudah dan cepat. Membersihkan dan mengupas kerang ukuran besar juga menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Dalam sehari, satu orang bisa membersihkan 4-5 karung kerang atau mengupas satu tong kerang yang direbus. Untuk membersihkan satu karung kerang, mereka dibayar 35.000 rupiah, sehingga jika mampu mengerjakannya hingga lima karung, mereka mendapatkan uang sekitar 175.000 per hari.

Saat ini, untuk memipil kerang sebanyak 4-5 karung sudah tidak memungkinkan. Hal ini karena jumlah kerang yang sudah mulai berkurang, dan ukuran kerang yang dikumpulkan berukuran kecil. Oleh sebab itu, untuk kondisi sekarang ini, paling tinggi mereka hanya bisa memipil 1-3 karung kerang saja. Bila dibayar sebesar 35.000 rupiah, maka mereka menghasilkan sekitar 35.000 – 100.000 per hari – ini bila bekerjanya dengan saudara ataupun tetangga. Jika mereka bekerja pada bos pengepul mereka hanya diupah sebesar 20.000 – 25.000 rupiah per karung. Kalau kondisinya demikian, mereka bisa saja hanya mendapatkan pendapatan per hari kurang dari 35.000 rupiah.

Waktu melaut yang tidak pasti, waktu kerang tiba di penampungan, dan ukuran kerang yang kecil, mempengaruhi jam kerja perempuan. Sebelum pembangunan tanggul laut, mereka mulai bekerja jam 10.00 WIB dan biasanya selesai sebelum magrib sekitar jam 18.00 atau paling lama jam 19.00 WIB. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa dari mereka mengeluh dengan situasi ini. Misalnya, dulu sebelum jam 10.00 WIB kerang sudah tiba di darat, sedangkan sekarang paling cepat jam 11 siang atau bahkan lebih siang dari itu. Sekarang, membersihkan dan mengupas kerang baru dimulai antara pukul 11.00 – 13.00 WIB, sehingga waktu bekerja pun selesai lebih lama yakni antara jam 20.00 – 21.00 WIB, tergantung jumlah kerang yang akan dipipil. Dulu, untuk satu karung kerang membutuhkan waktu 1-2 jam, namun sekarang bisa menghabiskan waktu 4-5 jam jika dilakukan sendiri. Jadi jika sehari satu orang bisa mengupas dua karung kerang, mereka menghabiskan waktu hingga delapan jam.

Penghasilan sebagai buruh kupas sangat kecil, dan waktu mereka habis untuk melakukan pekerjaan tersebut, ini merupakan pilihan satu-satunya untuk ‘membantu’ perekonomian keluarga dan untuk bertahan hidup. Beberapa dari mereka mengakui bahwa penghasilan sebagai buruh pemipil kerang lumayan untuk memenuhi kebutuhan dapur sehari-hari, sehingga penghasilan suami dapat disimpan untuk kebutuhan pendidikan anak-anak. Lagipula kondisi ekonomi yang semakin sulit memaksa perempuan untuk bekerja mencari uang tunai dengan berbagai cara. Mencari alternatif lain cukup sulit karena mereka tidak memiliki keahlian di bidang lain seperti menggunakan perahu, memancing, menyelam dan sebagainya.

2. Dampak Secara psikologis

Perempuan bertanggung jawab untuk menyiapkan alat-alat yang diperlukan untuk melaut, konsumsi suami dan

anak laki-laki selama melaut, sehingga mereka harus bangun lebih awal dari laki-laki. Setelah suami dan anak laki-laki berangkat, perempuan harus mengurus rumah, merawat anak, dan ketika kerang tiba di darat mereka harus segera mulai bekerja. Di malam hari, setelah selesai membesihkan dan mengupas, mereka masih harus mengurus rumah, menyiapkan makanan, dan merawat anak, sehingga perempuan tidur lebih lama dibandingkan laki-laki. Laki-laki mulai bekerja dari pukul 05.00 WIB dan pulang antara pukul 11.00 – 13.00 WIB. Sedangkan perempuan bangun sebelum pukul 05.00 WIB, setelah memberangkatkan suami melaut, dilanjutkan dengan pekerjaan rumah, selanjutnya setelah kerang tiba di penampungan mereka bekerja memipil kerang hingga pukul 21.00 WIB, dan setelah itu kadang masih harus mengurus rumah sebelum tidur. Hal ini mempengaruhi kondisi mereka secara psikologis yang ditunjukkan dengan emosi mudah marah.

Menurunnya penghasilan perempuan pemipil kerang turut mempengaruhi kondisi ekonomi rumah tangganya. Salah satu solusi yang diambil untuk mengatasi keuangan dalam rumah tangga adalah dengan melakukan pinjaman uang. Memiliki utang adalah sesuatu yang menakutkan bagi mereka, takut tidak mampu membayar tepat waktu terutama ketika pinjaman melibatkan rentenir yang sudah jelas membebankan bunga pinjaman. Dalam rumah tangga, meminjam dan membayar uang diserahkan kepada perempuan (istri), sehingga mereka yang secara langsung berhubungan dengan bank, rentenir, dan sebagainya. Kondisi inilah, efek negatif dari berkurangnya mata pencaharian lebih besar dirasakan oleh perempuan daripada laki-laki. Bukan berarti laki-laki tidak berjuang untuk kehidupan rumah tangganya, mereka juga berusaha untuk pergi melaut, menangkap ikan untuk dijual dengan berbagai kerentanan yang bisa saja mengancam nyawanya. Tetapi, ketika

mereka dihadapkan dengan kondisi “sudah tidak ada uang”, ‘sudah tidak ada makanan’, maka perempuan berperan sepenuhnya untuk mengatasi kondisi tersebut.

Musim yang tidak memungkinkan untuk melaut tiba, perempuan mencari alternatif mata pencaharian untuk mendukung keberlanjutan keluarga. Biasanya pekerjaan alternatif seperti pedagang, tukang cuci, kerja di toko dan lain sebagainya sifatnya sangat sementara. Di antara sekian banyak yang jualan saat ini, pada akhirnya yang bertahan mungkin hanya dua atau tiga orang saja. Lagipula sekarang ini setiap orang berlomba-lomba untuk berjualan dan yang muncul adalah persaingan. Beberapa perempuan yang sebelumnya menjual kerang olahan berhenti karena semakin banyak yang jualan menu yang sama.

Pembangunan tanggul dengan cepat menutupi akses dan tempat perahu mereka bersandar. Tempat bersandar perahu saja sudah tergusur, jadi mungkin penggusuran manusia akan segera terjadi. Apalagi sebagian orang sudah secara nyata mengalaminya. Bayang-bayang akan penggusuran pun menimbulkan kegelisahan mendalam bagi perempuan. Pedagang makanan kecil dan minuman yang berjualan di sekitar tanggul dilarang oleh pengelola dengan alasan ingin ditertibkan dan dirapikan. Bagi mereka ini cara awal yang dilakukan untuk menggusur masyarakat. Ancaman penggusuran pun terus-menerus mengganggu hati dan pikiran perempuan. Kecemasan terhadap tempat tinggal mereka yang akan digusur/dibongkar menambatkan beban perempuan. Bagi perempuan yang tidak memiliki surat (sertifikat) rumah ini akan jauh lebih sulit karena mereka tidak bisa membuktikan bahwa itu miliknya.

KESIMPULAN

Proyek-proyek reklamasi untuk pembangunan tanggul laut tahap demi tahap mengganggu kehidupan masyarakat

di pesisir dari berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, budaya hingga kerentanan penggusuran. Perempuan dan laki-laki merasakan dampak negatif secara ekonomi dari reklamasi, namun dampak yang dirasakan perempuan berbeda dengan laki-laki. Efek penurunan ekonomi memberikan dampak yang lebih besar terhadap perempuan khususnya perempuan pemipil kerang. Hal ini karena perempuan diidentifikasi dengan pekerjaan-pekerjaan mengurus rumah tangga dan keluarga, sehingga ketika terjadi suatu masalah, perempuan memiliki peran utama untuk menyelesaikan persoalan yang ada.

Pengabaian perempuan dari setiap rancangan kebijakan dan program pembangunan di pesisir merupakan salah satu faktor yang menyebabkan beban perempuan meningkat saat menghadapi krisis. Perempuan sering kali tidak dilibatkan pada semua aktivitas perencanaan, sehingga mereka tidak mendapatkan informasi apapun secara terbuka mengenai kebijakan maupun proyek yang akan berjalan di daerahnya. Ketika proyek menimbulkan dampak negatif, yang dirasakan oleh perempuan dan laki-laki berbeda-beda. Untuk itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah acuan bagi pemerintah dan perancang program untuk memperhitungkan peran-peran mereka dan mempertimbangkan faktor-faktor negatif terhadap perempuan yang selama ini kurang perhatian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adharani, Y. et al. (2019). Jakarta Bay Reclamation: The Challenge between Policy, Environmental and Social Impacts. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 306(1): 1–9.
- Barsoum, G. (2021). From Fisher Wives to Fish Vendors: Gendered Livelihood Transitions in a Fishing Village in Egypt. *Journal of Rural Studies* 88: 117–25.

- Connelly, M. P., Li, T. M., MacDonald, M., and Parpart, J. L. (2000). Feminism and Development: Theoretical Perspectives.
- Eguavoen, I. (2022). Reclamation and Expulsion. *Frontiers of City Expansion and the Loss of Public and Communal Spaces at Abidjan's Lagoonal Waterfronts*. *Urban Forum* 33(3): 367–92. <https://doi.org/10.1007/s12132-021-09451-7>.
- Elmhirst, R. (2015). Feminist Political Ecology. *The Routledge Handbook of Gender and Development* (January 2015): 58–66.
- Fabinyi, M., et al. (2022). Coastal Transitions: Small-Scale Fisheries, Livelihoods, and Maritime Zone Developments in Southeast Asia. *Journal of Rural Studies* 91(April): 184–94. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2022.02.006>.
- Federici, S. (2004). Caliban and the Witch: Women, the Body and Primitive Accumulation. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.
- Hall, D., Hirsch, P., and Li, T. M. (2011). Introduction to Powers of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia. *National University of Singapore Press and University of Hawaii Press*: 1–27. <https://tspace.library.utoronto.ca/handle/1807/68628>.
- Harper, S. et al. (2020). Valuing Invisible Catches: Estimating the Global Contribution by Women to Small-Scale Marine Capture Fisheries Production. *PLoS ONE* 15(3): 1–16. <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0228912>.
- Ii, S. A. (2017). Politics and Gender: Case Study of the Saemangeum Reclamation Project, South Korea. *Asian Fisheries Science* 30(Special Is): 103–28.
- Khaerah, N., Hartaman, N., and Rahman, M. (2021). Impact of Sustainable Development of Coastal Areas and Small Islands in Makassar. *E3S Web of Conferences* 277: 01006.
- Klenk, R. M. (2004). 'Who Is the Developed Woman?': Women as a Category of Development Discourse, Kumaon, India. *Development and Change* 35(1): 57–78.
- Mourão, J. d. S., et al. (2020). Local Ecological Knowledge of Shellfish Collectors in an Extractivist Reserve, Northeast Brazil: Implications for Co-Management. *Hydrobiologia* 847(8): 1977–97.
- Putra, M., Pamungkas, A. (2014). Jurusan Perencanaan, and Fakultas Teknik. 2014. "Garuda1442308." 3(2).
- Qiao, Y., Yin, X., and Luo, Y. (2020). Assessment of the Impact of a Sea Reclamation Project in an Emerging Port City in Tianjin. *Journal of Coastal Research* 104(sp1): 584–92.
- Ribot, J. C., and Peluso, N.L. (2003). A Theory of Access. *Rural Sociology* 68(2): 153–81.
- Rocheleau, D., Thomas-Slayter, B., Wangari, E. (1996). Gender and Environment: A Feminist Political Ecology Perspective. In *Feminist Political Ecology*, , 22.
- Royandi, R. K. and Eva. (2019). Kontestasi Aktor dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir di Wilayah Pembangunan Reklamasi Teluk Jakarta. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial* (Vol 2, No 1 (2019): TEMALI Vol. 2 No. 1 Tahun 2019): 77–98. <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/temali/article/view/3619/2411>.
- Sahidu, A.M., Made, S., and Riniwati, S. (2021). Women in the Coastal Area and Seaweed Farming in Madura, East Java, Indonesia. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*,.
- Sayuti, A. M. Y. M. (2020). Analysis of Economic Benefits in Reclamation Activities and Coastal Conversion in Barru District. *International Journal of*

- Environment, Agriculture and Biotechnology* 5(2): 466–74.
- Suhardi. (2021). Analysis of the Center Point of Indonesia (CPI) Reclamation Policy of Makassar City in the Environmental Political Perspective. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 8(10): 12.
- Suo, A. N., Lin, Y., and Sun, Y. G. (2017). Impact of Sea Reclamation on Zoobenthic Community in Adjacent Sea Area: A Case Study in Caofeidian, North China. *Applied Ecology and Environmental Research* 15(3): 871–80.
- Suriadi, A. (2019). Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Tanggul Pantai di Teluk Jakarta dan Strategi Mitigasinya. *Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum* (Vol 11, No 1 (2019)): 59–72. <http://jurnalsosekpu.pu.go.id/index.php/sosekpu/article/view/271>.
- Susilowati, I. (2021). Gender Assessment Report for Aru Islands, Maluku.
- Valenzuela, V. P. B., Esteban, M., and Onuki, M. (2020). Perception of Disasters and Land Reclamation in an Informal Settlement on Reclaimed Land: Case of the BASECO Compound, Manila, the Philippines. *International Journal of Disaster Risk Science* 11(5): 640–54. <https://doi.org/10.1007/s13753-020-00300-y>.
- Yustiana, D., Fadli, M. (2021). Analysis Study of Coastal Reclamation Impact To the National Resilience (a Literary, Philosophical, Juridical and Sociological. *Sttal*<http://seminarpasca-sttal.ac.id/index.php/seminarpasca-sttal/article/view/65>.